

**PERANAN INVESTASI PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN**

LPPM UNIVERSITAS NATORAMA SURABAYA

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suaturangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, Pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan Pembangunan dan hasil- hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan investasi pemerintah dan peranan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lamongan tahun 2013-2017.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa perkembangan investasi pemerintah di Kabupaten Lamongan dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi setiap tahun yaitu sebesar Rp. 941.460.406.000 menjadi Rp. 1.306.163.900.000. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2014 dan 2017 yaitu sebesar Rp. 810.655.714.000 dan Rp. 1.306.163.900.000 di bandingkan tahun sebelumnya. Peranan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lamongan pada tahun 2013-2017 tidak cukup besar dalam pertumbuhan yang ada di Kabupaten Lamongan, karena masih fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan perekonomian sebesar 5,77% lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 6,30% dan lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 6,93%, kemudian di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,86% dan tahun 2017 menurun menjadi 5,63%.

Ada beberapa Rekomendasi yang peneliti ajukan yaitu diharapkan kepada Pemerintah dapat terus lebih meningkatkan perkembangan investasi pemerintah yaitu belanja modal agar lebih meningkatkan yang ada di Kabupaten Lamongan, Pemerintah terus meningkatkan PDRB terutama sektor-sektor yang menunjang untuk pertumbuhan dan perekonomian pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah di harapkan dapat terus untuk memonitor proses pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan secara berkala, Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan tabungan investasi masyarakat (sektor swasta) dengan memberikan sosialisasi pentingnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten Lamongan, dan Pemerintah menaikkan kapasitas produksi masyarakat seperti sumber-sumber alam dan manusia, kapital dan teknologi untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Investasi, Pemerintah, Perekonomian Masyarakat.

THE EFFECT OF BANKING ON INCREASING RURAL COMMUNITY WELFARE

ABSTRACT

The banking sector for a country has a very important influence, especially in its influence as a lifeline for the national economy. The influence of the banking sector in development can also be seen in its function as a means of transmitting monetary policy. One of the missions of the Bank in conducting banking activities is to provide credit to its customers (UMKM) to support the improvement of the community's economy. Overall, it is known that on average 49.41 percent of the population expenditure in Lamongan Regency is used for consumption of non-food commodities. This condition can be an indication of the level of welfare of the people in Lamongan Regency better. Banking efforts in improving the welfare of rural communities have been implemented well, it can be seen that PD. BPR Lamongan Regional Bank has run several programs related to banking and government in improving the welfare of the village community is to provide capital loans to UMKM entrepreneurs in the village through the Village Bank, opening bank units in rural areas (Cash Office PD.BPR Bank Daerah Lamongan) with a small interest savings and loan program, providing collaborative education and innovation programs between banks and the government for rural communities, giving extra attention to the agricultural sector in rural economic growth, and providing financial management services to rural communities with a neater and more modern system.

This study uses qualitative methods, by collecting data through observation, documentation and interviews. In relation to the influence of banks on improving the welfare of rural communities in the district of Lamongan, a number of recommendations were given, namely to Improve Rural Community Economies, so Institutional Village-Owned Enterprises Need to be Assessed for Development in Leading Production / Business Centers in Potential Villages . So that the Role of Banks in Spurring the Economy and Increasing the Welfare of Rural Communities Will Be Directly Perceived Up to the Village Level, the Local Government of Lamongan Regency and Banks Can Develop Entrepreneurs Engaging in Superior Products, through stages of recruitment / selection, additional education / training (on entrepreneurial aspects and technical and business skills) and the provision of capital / financing credit facilities with a revolving fund / revolving fund scheme, Increased access to UMKM financing.

Keywords: Banking, Welfare, Rural Communities, UMKM

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, Pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur Pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Menumbuhkan kegiatan ekonomi untuk menciptakan stabilitas pembangunan kehidupan bangsa dan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan sumber

pembiayaan tidak hanya berasal dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tetapi juga dibutuhkan pembiayaan dari sumber lain dari sektor swasta misalnya investasi untuk membiayai dan menggerakkan program pembangunan yang telah direncanakan dalam agenda program pembangunan nasional maupun daerah. Investasi sebagai salah satu kegiatan ekonomi untuk membiayai berbagai program pembangunan, baik untuk kepentingan kalangan dunia usaha maupun pemerintah, sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkesinambungan dan memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum.

Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja rutin maupun pembangunan atau pemeliharaan dan belanja modal), dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pembangunan (dan atau belanja modal dan pemeliharaan) merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi.

Dengan demikian pemerintah daerah yang telah diberi keleluasaan untuk mengatur pengeluarannya tersebut, sudah sewajarnya apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan untuk kepentingan publik dalam bentuk investasi pemerintah. Oleh karena itu salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah pemanfaatan semaksimal mungkin keuangan daerah bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah melalui belanja modal. Menurut BPKAD Kabupaten Lamongan, Belanja modal pemerintah Kabupaten Lamongan pada APBD tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan yang cukup positif, tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan belanja modal sebesar Rp.407.084.790.225 di bandingkan pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2016 sebesar Rp.633.892.066.539, namun dari tahun ketahun belanja modal pemerintah Kabupaten Lamongan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah belanja modal Kabupaten Lamongan, maka analisis pertumbuhan ekonomi regional memberikan gambaran membaiknya suatu perekonomian di Kabupaten Lamongan.

Investasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercermin melalui belanja modal yang dianggarkan Kabupaten Lamongan setiap tahunnya. Hal ini tentunya bertujuan untuk dapat diikuti dengan peningkatan dana yang dialokasikan untuk investasi. Dan pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten Lamongan.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan investasi pemerintah di Kabupaten Lamongan tahun 2013-2017.
2. Mengetahui peranan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lamongan tahun 2013-2017.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Daerah Penelitian

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada 6o51' - 7o23' Lintang Selatan dan 112o33' - 112o34' Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1) Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Sekaran, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.

2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.

3) Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah, Karangbinangun, Glagah.

B. Perkembangan investasi pemerintah di Kabupaten Lamongan

Investasi merupakan unsur utama dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya jumlah investoryang menanamkan modalnya di kabupaten Lamongan, diharapkan akan menambah jumlah investasi yang nantinya akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran, sehingga perekonomian dapat semakin membaik.

Membangun suatu wilayah diharapkan membangun daerah yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Caranya adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan potensidaerah dengan mencari dana untuk anggaran pembangunan. Salah satunya adalahmeningkatkan APBD dengan cara membangun sumber- sumber pertumbuhan sesuaipotensi wilayah. Dengan melihat APBD setiap tahunnya maka akan terlihat perkembangan-perkembangan sudah tercapai sesuai rencana atau belum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumentkebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah. Dalam APBD termuat prioritas – prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapaimelalui pelaksanaan belanja daerah sesuai sumber daya yang tersedia baik yangdidapatkan melalui skema transfer maupun perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Salah satu indikator yang juga sering dipergunakan untuk mengukurperkembangan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena PDRB merupakan gambaran tentang produk yang dihasilkan olehunit-unit ekonomi yang ada pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Hasil perhitungan produk domestik regional brutoKabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada tabel.Ternyata bahwapertumbuhan produk domestik regional bruto Kabupaten Lamongan atas dasar harga konstan selama kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,10%pertahun yaitu dari nilai sebesar Rp. 19.848.838,05pada tahun 2013 menjadi Rp24.927.950,00 pada tahun 2017.

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untukpembelian/ pengadaan/ pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnyalebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dankegiatan

pemerintah daerah.Melalui adanya belanja modal tersebut pemerintah memiliki kemampuanuntuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada didaerahnya, dengan adanyasarana dan prasarana kesehatan, keamanan, transportasi yang baik tentu menjadimodal bagus untuk menarik investor serta mempercepat mobilitas setiap individuyang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Persentase (%)
2013	240.071.772.482,00	95,73
2014	353.435.615.278,40	96,60
2015	459.305.792.650,00	96,60
2016	616.499.721.973,00	96,60
2017	505.221.589.585,00	97,18
Rata-rata	-	96,54

Berdasarkan tabel 3 di atas, realisasi belanja modal Kabupaten Lamongan sebagaimana terlihat pada tabel, bahwaperkembangan belanja modal konstan selama kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 96,54%pertahun yaitu dari nilai sebesar Rp. 240.071.772.482 pada tahun 2013 menjadi Rp505.221.589.585 pada tahun 2017.

Belanja Modal Kabupaten Lamongan dengan enam sektor belanja modal yang terdiri daribelanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan,aset tetap lainnya, dan aset lainnya.Dari semua sektor belanja, yang lebih besar digunakan untuk belanja modalKabupaten Lamongan yaitu jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin. Tapi bukan berarti sektor belanja yang lain tidak mendapatkanperhatian, namun secara skala prioritas, diakui bahwa tiga sektor belanja di atasadalah dominan untuk menjadi perhatian Kabupaten Lamongan.

Besarnya investasi juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut khususnya untuk masyarakat kabupaten Lamongan, untuk

Tabel 4. Perkembangan Total Dana Investasi Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2017

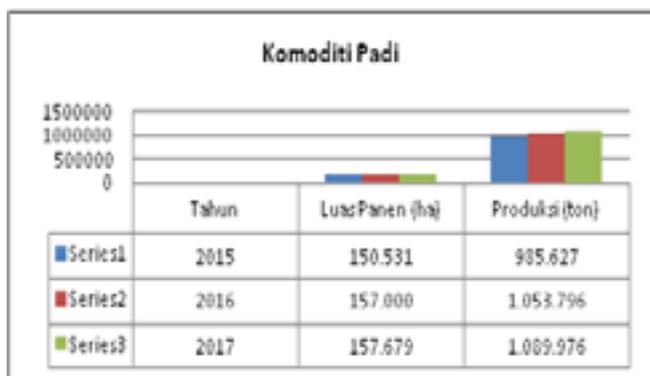
Tahun	Investasi (RP)	Perkembangan (%)
2013	941.460.406.000	-
2014	810.655.714.000	13,89
2015	3.135.341.878.643	286,7
2016	1.306.163.900.000	58,34
2017	1.306.163.900.000	58,34
Rata-rata	-	83,45

Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa dari total dana investasi yang di salurkan oleh pemerintah setiap tahunnya selama tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi rata-rata sebesar 83,45 persen berkisar antara Rp.941.460.406.000 sampai Rp. 1.306.163.900.000. Dari dana investasi yang disalurkan tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang besar walaupun pertumbuhannya mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan tersebut berkisar antara 13,89 dan 58,34 persen. Dan mengalami satu kali angka pertumbuhan positif yakni pada tahun 2015 sebesar 286,7.

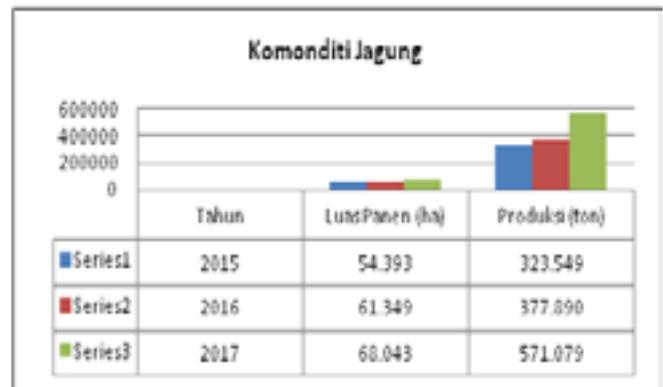
C. Potensi Invstasi Kabupaten Lamongan

1. Sektor Pertanian

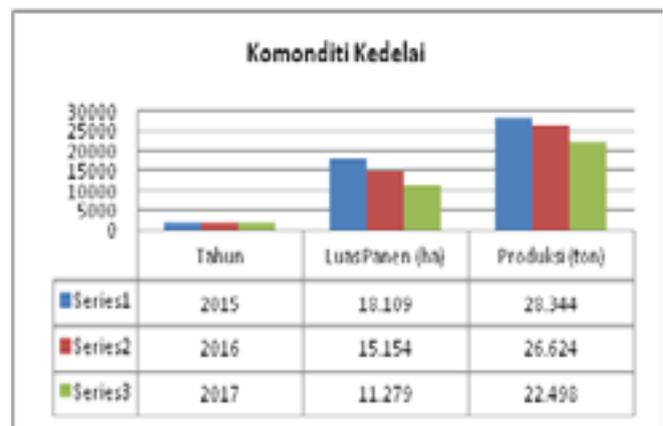
a. Komoditi Padi



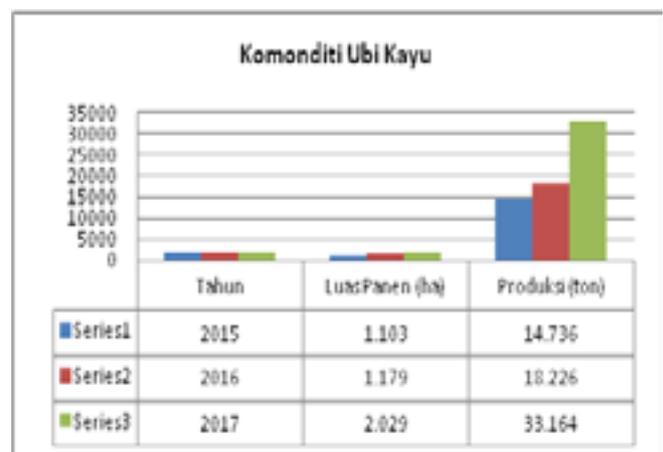
b. Komoditi Jagung



c. Komoditi Kedelai

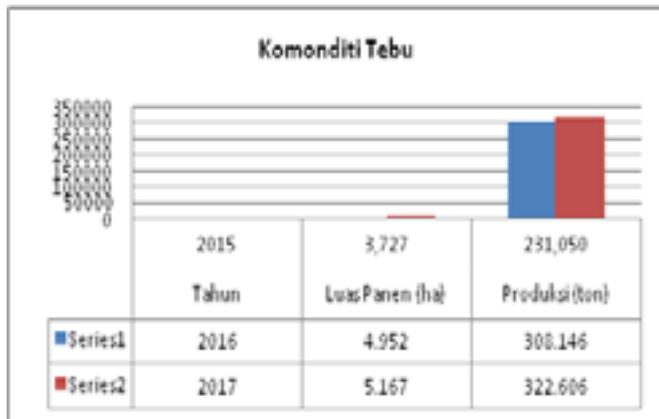


d. Komoditi Ubi Kayu

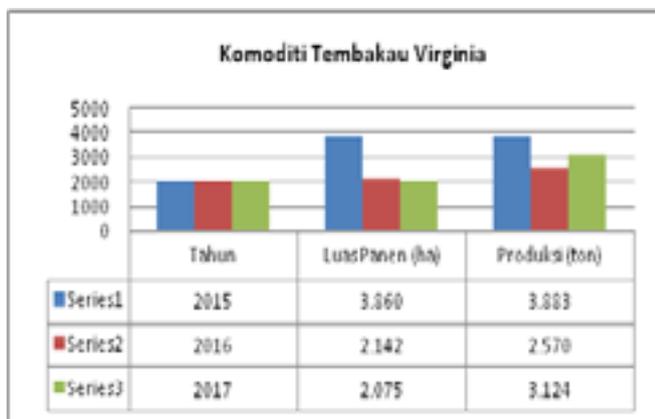


2. Sektor Perkebunan

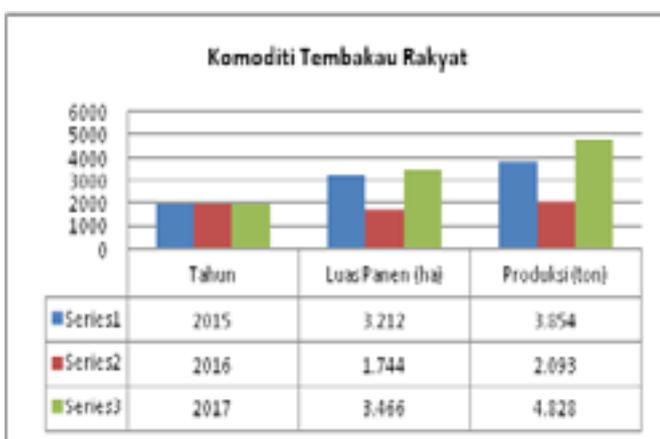
a. Komoditi Tebu



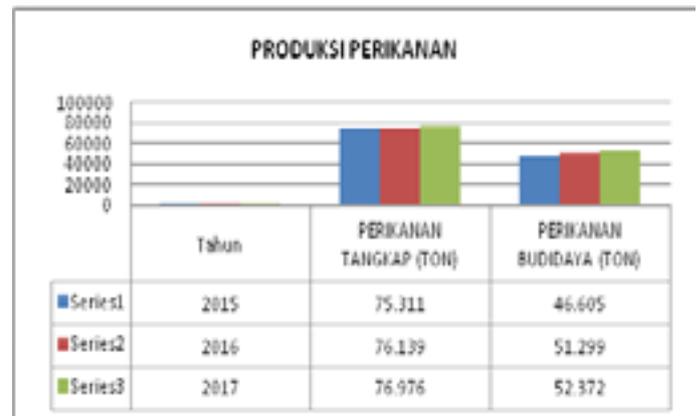
b. Komoditi Tembakau Virginia



c. Komoditi Tembakau Rakyat



3. Sektor Perikanan

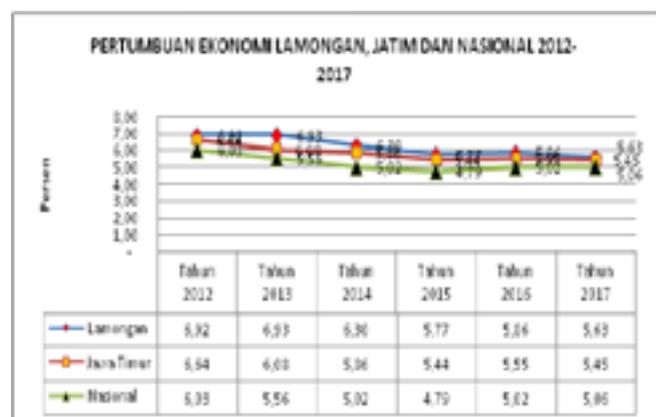


4. Sektor Perijinan

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diketahui bahwa Perkembangan Investasi Di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 S/D 2017 sudah berjalan secara maksimal dengan hasil yang diperoleh hingga tahun 2017.

5. Sektor Ekonomi

Hasil survey tentang pertumbuhan ekonomi kabupaten lamongan, jawa timur dan nasional tahun 2012 s/d 2017 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 sudah cukup baik dengan nilai 5,63% meskipun mengalami penurunan 0,23% dari tahun 2016.



6. Sektor Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil survey tentang potensi investasi Kabupaten Lamongan, menunjukkan bahwa peran investasi pemerintah di Kabupaten Lamongan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan dapat dilihat perbandingan pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan Nasional nilainya tidak selisih jauh, dan nilai pada tahun 2017 Kabupaten Lamongan mencapai 5,63%.

D. Peran investasi pemerintah terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lamongan

Investasi pemerintah (Belanja modal) memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat di Kabupaten Lamongan. Jika pemerintah bisa meningkatkan alokasi belanja modal dibanding meningkatkan alokasi untuk belanja pegawai yang sudah semakin besar yang tidak dibarengi dengan kinerja yang semakin baik, tentu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan bisa lebih baik. Sebab Alokasi belanja modal yang penggunaannya memang untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong produktivitas penduduk yang pada gilirannya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya, begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lamongan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan.

Dalam berbagai teori ekonomi, baik teori ekonomi makro maupun ekonomi pembangunan disebutkan bahwa penanaman modal atau investasi merupakan salah satu variabel yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ini dimaksudkan, karena peningkatan investasi akan mendorong peningkatan pendapatan para pengusaha atau pekerja yang kesemuanya itu akan mengacu pada peningkatan perekonomian suatu daerah atau masyarakat. Perkembangan investasi cukup tinggi begitu juga pertumbuhan PDRB. Walaupun pertumbuhan investasi pada tahun 2014 sebesar 13,89 persen, tahun 2015 sebesar 286,7 persen, tahun 2016 dan 2017 sebesar 58,34 persen, hal ini diketahui

bahwa pertumbuhan investasi terjadi fluktuatif dengan kenaikan pada tahun 2015 yang cukup besar ini dikarenakan nilai investasi yang masuk di Lamongan tercatat mencapai sebesar Rp 3,13 triliun. Dengan jumlah perusahaan sebanyak 1.385 unit, yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1,19 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 1,03 triliun dan ditahun 2016, 2017 mengalami penurunan sebesar 58,34 persen secara stabil.

Penyebab defisit bisa muncul dalam kondisi krisis ekonomi, karena keadaan ini akan berimbas kepada anggaran negara. Dalam keadaan krisis akan memaksa pemerintah untuk mengadakan pengeluaran ekstra untuk memperbaiki keadaan ekonomi (pemulihan ekonomi). Oleh karena itu, ekspansi anggaran akan memacu pertumbuhan ekonomi, dengan demikian dapat dikatakan penyerapan dan efektivitasnya merupakan masalah krusial.

Untuk pertumbuhan PDRB juga kadang-kadang berlawanan arah dengan pertumbuhan investasi. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sebesar 6,93 persen berlawanan arah dengan pertumbuhan investasi. Pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB mengalami penurunan sebesar 5,77 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan menjadi 5,86 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 5,63 persen, sehingga berlawanan arah dengan pertumbuhan investasi.

Dengan demikian peranan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lamongan sangat signifikan. Karena penurunan investasi terjadi disebabkan oleh krisis ekonomi sehingga banyak investor yang menarik diri dari Pemerintah. Investasi pemerintah di Kabupaten Lamongan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan, namun pengaruhnya tidak terlalu besar. Jika pemerintah mampu meningkatkan investasi di semua sektor perekonomian di Kabupaten Lamongan, tentu akan lebih baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lamongan khususnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat di simpulkan sebagaiberikut:

1. Perkembangan investasi pemerintah di Kabupaten Lamongan dari tahun2013-2017 mengalami fluktuasi setiap tahun yaitu sebesar Rp. 941.460.406.000menjadi Rp. 1.306.163.900.000. Walaupun sempat mengalamipenurunan di tahun 2014 dan 2017 yaitu sebesar Rp.810.655.714.000dan Rp.1.306.163.900.000 di bandingkantahun sebelumnya.
2. Peranan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat diKabupaten Lamongan pada tahun 2013-2017 tidak cukup besar dalam pertumbuhan yang ada di Kabupaten Lamongan, karena masih fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan perekonomian sebesar 5,77% lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 6,30% dan lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 6,93%, kemudian di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,86% dan 2017 sebesar 5,63%.

REKOMENDASI

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas maka direkomendasikan kepada:

1. Pemerintah dapat terus lebihmeningkatkan perkembangan investasi pemerintah yaitu belanja modal dikeuangan, khususnya laporan akhir, agarlebih meningkatkan yang ada di Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah terus meningkatkan PDRBterutama sektor-sektor yang menunjang untuk pertumbuhan danperekonomian pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Pemerintah di harapkan dapat terus untuk memonitoriproses pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan secara berkala.
4. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan tabunganinvestasi masyarakat (sektor swasta) dengan memberikan sosialisasi pentingnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten Lamongan.
5. Pemerintah menaikkan kapasitas produksi masyarakat seperti sumber-sumber alam dan manusia, kapital dan teknologi untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Narbuko (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi sektor publik (Edisi 3)*. Jakarta : Erlangga.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPF
- Mankiw, Gregory N, 2003, *Teori Makroekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Sukirno, S. 2000, *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- <http://bpkad.lamongankab.go.id/>
- <http://gabrielsebastian100.blogspot.co.id/2012/04/pembahasan-investasi-dan-faktor-yang.html>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi
- <https://lamongankab.bps.go.id/>
- <https://portal-ilmu.com/teori-teori-pertumbuhan-ekonomi/>
- <http://portal.lamongankab.go.id/home/berita/item/8766-selama-2014-rp-810-miliar-investasi-masuk-lamongan.html>
- <http://www.kadinsurabaya.or.id/read/kadin-jawa-timur-dukung-investor-masuk-lamongan>